

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arba. 2015. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo. 2008. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika
- Bryan A Garner (ed). 2004. *Black's Law Dictionary, Eight Edition*. A Thompson Business
- CST Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Eva Banowati. 2014. *Geografi Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak
- H Margono. 2019. *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*. Jakarta: Sinar Grafika
- Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi. 1989. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES
- Peter Salim, Yenny Salim. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modern English Press
- Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu
- Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rosnidar Sembiring. 2017. *Hukum Pertanahan Adat*. Depok: Rajawali Pers
- Salim HS. 2002. *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soerjono Soekanto. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press
- Widodo. 2017. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Jakarta: Raja Grafindo
- Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

PMNA / Ka. BPN No. 5 Tahun 1999.

Peraturan Menteri LHK No P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2019 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak

Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 35/Menhut-II/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang perubahan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tanggal 15 Juni 1999 Tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah I Sumatera Barat 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar.

Surat Keputusan (SK) Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor S.598 / Menlhk / Setjen / PLA.2 / 8 / 2016 tentang Penetapan Fungsi Pokok Kawasan Pelestarian Alam sebagai Cagar Alam Maninjau

Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya

C. Jurnal, Kamus, dan Website

Husen Alting. 2006. *Pengakuan dan Perlindungan Hak Masyarakat Adat Tanah di Maluku Utara: Perspektif Dinamika Hukum di Era Otonomi Daerah*. Disertasi Program Pasca Sarjana. Universitas Brawijaya. Malang

Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Nur Hasan Ismail. 2006. *Perkembangan Hukum Pertanahan Indonesia: Suatu Pendekatan Ekonomi Politik*. Disertasi Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Setiono. 2004. *Rule of Law(Supremasi Hukum)*. Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana. Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Tirto.id, diakses dari <https://tirto.id/warga-adat-sumbar-tebang-pohon-terancam-penjara-apa-yang-keliru-cGha>, pada tanggal 4 April 2019, pukul 19.02 WIB

<https://sumbarsatu.com/berita/20548-pemnag-dan-warga-nagari-koto-malintang-komit-menjaga-lingkunga>, pada tanggal 19 Maret 2020, pukul 18.45 WIB

